

Strategic Triangle Penguatan Program Keluarga Harapan (PKH Plus) di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik

Evianti Kharima¹⁾, Diana Hertati²⁾

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik, Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
evianti.kharima9@gmail.com¹⁾, diana.adne2023@gmail.com²⁾

ABSTRACT

This study aims to analyze the strategic triangle of strengthening the Family Hope Program (PKH Plus) in Driyorejo District, Gresik Regency. PKH Plus is important as part of social protection for the elderly, especially amidst the economic and social challenges they face. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The analysis is based on the strategic triangle model (Moore, 1995) which consists of public value, legitimacy and environmental support, and operational capacity. The results of the study indicate that PKH Plus has a direct impact on improving the quality of life of the elderly in Driyorejo District, Gresik Regency, both in terms of meeting basic needs, access to services, and feeling cared for. Support from various parties as well as the availability of adequate human resources and facilities further strengthens the implementation of the program. This study concludes that the strengthening strategy of PKH Plus in Driyorejo District, Gresik Regency has been implemented well and has a real impact on the welfare of the elderly. Institutional synergy and improving the quality of implementers are important to ensure the sustainability of the program.

Keywords: Strengthening; PKH Plus; Triangle Strategy

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategic triangle penguatan Program Keluarga Harapan (PKH Plus) di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. PKH Plus menjadi penting sebagai bagian dari perlindungan sosial bagi lansia, terutama di tengah tantangan ekonomi dan sosial yang mereka hadapi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis dilakukan berdasarkan model *strategic triangle* (Moore, 1995) yang terdiri dari nilai publik, legitimasi dan dukungan lingkungan, serta kapasitas operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH Plus memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup lansia di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar, akses layanan, maupun rasa diperhatikan. Dukungan dari berbagai pihak serta tersedianya SDM dan fasilitas yang memadai turut memperkuat pelaksanaan program. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi penguatan PKH Plus di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik telah berjalan dengan baik dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan lansia. Sinergi kelembagaan dan peningkatan kualitas pelaksana menjadi hal penting untuk menjamin keberlanjutan program.

Kata kunci: Penguatan; PKH Plus; Strategi Triangle

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini tengah menghadapi fase penuaan penduduk (*aging population*) yang ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk lanjut usia (lansia). Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional tercatat bahwa 11,75% dari total penduduk Indonesia merupakan lansia (Statistik, 2023). Proyeksi BPS menyebutkan bahwa angka ini akan terus meningkat hingga tahun 2035. Rasio ketergantungan lansia telah mencapai 17,08% yang berarti setiap 100 individu usia produktif harus menanggung sekitar 17 lansia. Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi negara, terutama dalam menjamin keberlanjutan kesejahteraan kelompok lansia yang rentan secara ekonomi, sosial dan kesehatan. Kondisi lansia di pedesaan umumnya lebih rentan dibandingkan di perkotaan (Damanik, 2024). Sekitar 70% lansia tidak memiliki penghasilan tetap, menyebabkan ketergantungan yang tinggi pada bantuan sosial.

Untuk merespons permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan Program Keluarga Harapan Plus (PKH Plus). PKH Plus merupakan perkuatan dari Program Keluarga Harapan (PKH) reguler yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Berbeda dengan PKH reguler yang menggunakan dana APBN dan menysasar balita, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas, PKH Plus secara khusus ditujukan bagi lansia rentan yang telah tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan sepenuhnya dibiayai oleh APBD Provinsi Jawa Timur. PKH Plus tidak hanya menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp2.000.000 per orang per tahun, namun juga menyertakan kegiatan pendampingan seperti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dan Posyandu Lansia. Kabupaten Gresik menjadi salah satu wilayah dengan jumlah penerima terbanyak yaitu 2.366 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Di antara 18 kecamatan di Gresik, Kecamatan Driyorejo menjadi daerah yang menarik untuk dikaji karena berhasil mencatatkan tingkat penyaluran 100% secara konsisten selama empat tahun terakhir. Data Dinas Sosial Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa pada tahun 2024, terdapat 128 lansia di Kecamatan Driyorejo yang menerima manfaat dari PKH Plus.

Namun demikian, PKH Plus tengah menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan jumlah pendamping sosial yang menyebabkan pendamping harus menangani puluhan KPM sekaligus (Izza et al., 2021). Selain itu, tantangan lain adalah sifat bantuan yang cenderung konsumtif, berisiko menciptakan ketergantungan jika tidak disertai upaya pemberdayaan yang berkelanjutan. Permasalahan ini juga diungkapkan dalam beberapa studi terdahulu, seperti penelitian (Brianita & Prathama, 2024), (Kusuma, 2023) yang menunjukkan bahwa meskipun PKH Plus berdampak positif, namun masih terdapat kelemahan dalam strategi penguatan, baik dari sisi sumber daya maupun efektivitas pelaksanaan di lapangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah bagaimana *strategic triangle* penguatan Program

Keluarga Harapan (PKH Plus) di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dengan fokus utama dalam kajian ini adalah menganalisis strategi penguatan program PKH Plus dengan menggunakan model *Strategic Triangle* dari (Moore, 1995) yang meliputi tiga aspek utama: *public value* (nilai publik), *the authorizing environment* (legitimasi dan dukungan lingkungan), dan *operational capacity* (kapasitas operasional). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi kebijakan publik serta kontribusi praktis bagi penguatan program kesejahteraan lansia di tingkat kecamatan. Dengan melihat bahwa Kecamatan Driyorejo merupakan satu-satunya kecamatan yang secara konsisten mencapai tingkat penyaluran 100%, keberhasilan ini perlu digali lebih dalam. Terlebih lagi, masih minim kajian ilmiah yang secara spesifik membahas strategi penguatan PKH Plus pada wilayah kecamatan, terutama dengan pendekatan strategis yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi signifikan untuk mengisi kesenjangan literatur (*research gap*) sekaligus memberikan rekomendasi bagi penguatan kebijakan kesejahteraan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam *strategic triangle* penguatan Program Keluarga Harapan (PKH Plus) di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Metode tersebut dianggap tepat untuk mengungkap realitas sosial dan dinamika kebijakan secara menyeluruh. Fokus penelitian merujuk pada tiga aspek utama dalam model *strategic triangle* (Moore, 1995) yaitu nilai publik (*public value*), legitimasi dan dukungan lingkungan (*the authorizing environment*), serta kapasitas operasional (*operational capacity*).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Koordinator Kabupaten PKH Plus, Koordinator Kecamatan, Pendamping Sosial PKH Plus, pihak Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, serta lansia penerima manfaat. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* dengan kriteria tertentu yang relevan dengan pelaksanaan program. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, yang menjadi salah satu kecamatan percontohan pelaksanaan PKH Plus karena keberhasilannya mencapai tingkat penyaluran 100% selama empat tahun berturut-turut. Validitas data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, untuk memastikan keabsahan informasi yang dikumpulkan. Proses analisis data menggunakan model interaktif (Miles, M. B., & Huberman, 2014) yang terdiri dari empat tahapan: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Setiap tahap dilakukan secara berulang hingga diperoleh pemahaman menyeluruh terhadap *strategic triangle* penguatan PKH Plus. Melalui metode tersebut penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan kontekstual mengenai dampak kebijakan terhadap kesejahteraan lansia, sekaligus memberikan rekomendasi yang berbasis temuan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategic triangle penguatan Program Keluarga Harapan (PKH Plus) di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Analisis dilakukan menggunakan model *Strategic Triangle* (Moore, 1995), yang mencakup tiga aspek yaitu: nilai publik (*public value*), legitimasi dan dukungan lingkungan (*the authorizing environment*), serta kapasitas operasional (*operational capacity*).

1. Nilai Publik (*Public Value*)

Nilai publik pada Program Keluarga Harapan (PKH Plus) terlihat dari perubahan kondisi lansia sebelum dan sesudah menerima bantuan. Sebelum memperoleh bantuan, para lansia menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari kesulitan ekonomi, kesehatan dan sosial. Kondisi ini diperparah dengan adanya sejumlah lansia penerima manfaat PKH Plus yang tergolong sebagai lansia tunggal di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Yaitu mereka yang tinggal seorang diri tanpa pasangan hidup maupun pendamping keluarga.

Tabel 1. Jumlah Lansia Tunggal PKH Plus Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2024

No.	Nama Desa	Jumlah Lansia Tunggal (Orang)
1	Krikilan	0
2	Driyorejo	0
3	Cangkir	0
4	Bambe	0
5	Mulung	2
6	Tenaru	0
7	Petiken	1
8	Kesambenwetan	2
9	Sumput	0
10	Tanjungan	1
11	Banjaran	1
12	Karangandong	1
13	Mojosarirejo	1
14	Wedoroanom	4
15	Randegansari	1
16	Gadung	2
Total		16

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Gresik diolah peneliti, 2025.

Selain bantuan finansial, penguatan nilai publik juga tercermin melalui kegiatan P2K2 dan posyandu lansia yang tidak hanya memberikan edukasi secara satu arah, tetapi menciptakan ruang yang memungkinkan lansia berbagi pengalaman dan mengajukan pertanyaan. Keberadaan posyandu lansia dan P2K2 di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik merupakan strategi penguatan program dalam perlindungan sosial. P2K2 dan posyandu lansia juga berkontribusi terhadap nilai

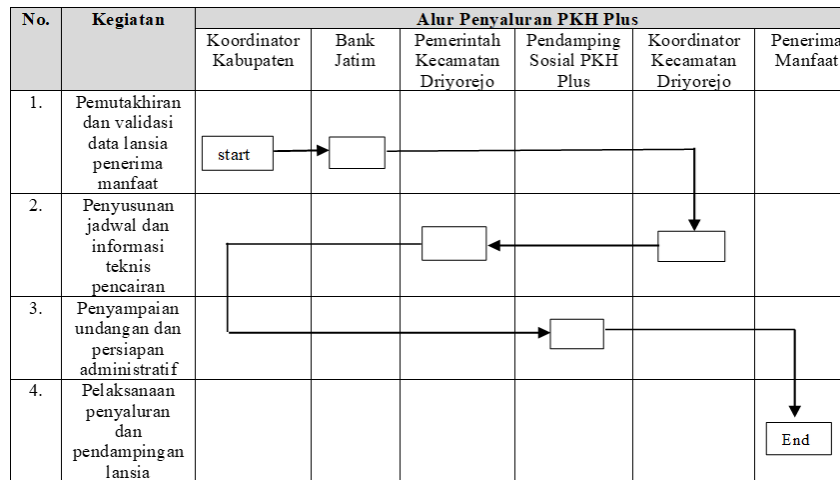
publik dengan menciptakan lansia yang lebih sadar terhadap kesehatannya. Mengenai lansia penerima manfaat yang memiliki keterbatasan fisik sehingga tidak dapat hadir secara langsung. Maka pelaksana PKH Plus melakukan kunjungan langsung ke rumah atau *home visit*.

Sehingga nilai publik (*public value*) PKH Plus di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dimaknai sebagai perubahan nyata yang dirasakan langsung oleh lansia penerima manfaat sebelum dan setelah mendapatkan bantuan sosial PKH Plus. Sebelum mendapatkan bantuan sosial PKH Plus lansia di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik hidup dalam kondisi keterbatasan. Mengandalkan keluarga untuk kebutuhan pokok, kesulitan mengakses layanan kesehatan serta mengalami kesepian akibat menjadi lansia tunggal. Namun setelah menerima bantuan sosial PKH Plus terjadi transformasi dimana lansia menjadi lebih mandiri secara finansial, dapat membeli kebutuhan pribadi, lebih terakses layanan kesehatan serta merasa lebih diperhatikan oleh pemerintah maupun pendamping sosial PKH Plus. Artinya, strategi penguatan PKH Plus di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik menciptakan dampak yang tercermin dari terpenuhinya kebutuhan pokok lansia, yang pada akhirnya berkontribusi langsung terhadap peningkatan tingkat kesejahteraan penerima manfaat.

2. Legitimasi dan Dukungan Lingkungan (*The Authorizing Environment*)

Strategi penguatan Program Keluarga Harapan (PKH Plus) di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik tidak hanya tergantung pada nilai publik tetapi juga pada legitimasi dan dukungan lingkungan. Artinya, program harus didukung oleh pemangku kepentingan serta mendapatkan kepercayaan dari masyarakat agar keberlanjutan pelaksanaannya terjaga. Keterlibatan aktor pemerintah terjadi saat proses penyaluran, pelaporan serta *monitoring* dan evaluasi. Penyaluran bantuan sosial PKH di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik tidak terlepas dari kerja sama berbagai pihak yang saling terhubung. Berikut ini ditampilkan alur penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Plus di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik yang disajikan secara sistematis.

Tabel 2. Alur Penyaluran PKH Plus



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Gresik diolah peneliti, 2025.

Pada tabel tersebut setiap tahapan penyaluran menunjukkan koordinasi yang menjadi kunci dalam memastikan penyaluran bantuan sosial PKH Plus berjalan tepat sasaran, tepat waktu dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Proses pelaporan PKH Plus di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa program benar-benar berjalan sesuai tujuan. Melalui pelaporan yang tertib dan berjenjang, setiap pelaksana memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan di lapangan. Pelaporan di tingkat kabupaten dimulai dari rekapitulasi data pelaksanaan penyaluran yang dihimpun dari koordinator kabupaten, koordinator kecamatan dan pendamping sosial PKH Plus. Tabel di bawah ini menggambarkan tentang realisasi PKH Plus selama empat tahun berturut Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik menjadi kecamatan percontohan dalam PKH Plus di Kabupaten Gresik.

Tabel 3. Realisasi Penyaluran PKH Plus Kabupaten Gresik

Realisasi Penyaluran PKH Plus Kabupaten Gresik									
No.	Kecamatan	2021		2022		2023		2024	
		Realisasi (Tersalurkan)	Tidak Tersalurkan	Realisasi (Tersalurkan)	Tidak Tersalurkan	Realisasi (Tersalurkan)	Tidak Tersalurkan	Realisasi (Tersalurkan)	Tidak Tersalurkan
1.	Balongpanggang	92	0	147	0	121	1	96	2
2.	Benjeng	189	0	266	4	222	3	195	1
3.	Bungah	118	0	143	7	129	0	106	1
4.	Cerme	143	0	217	1	194	5	167	4
5.	Driyorejo	97	0	182	0	151	0	128	0
6.	Duduksampeyan	105	0	151	2	130	0	107	2
7.	Dukun	217	0	321	2	267	2	220	3
8.	Gresik	41	0	52	2	48	1	36	2
9.	Kebomas	18	0	34	2	31	0	27	0
10.	Kedamean	163	0	245	3	202	0	177	3
11.	Manyar	62	0	69	3	61	2	49	1
12.	Menganti	162	0	274	2	251	1	216	4
13.	Panceng	153	0	218	2	189	3	163	3
14.	Sangkapura	98	0	154	1	132	0	110	2
15.	Sidayu	96	0	157	3	141	0	124	0
16.	Tambak	90	0	123	2	106	0	92	0
17.	Ujungpangkah	121	0	185	4	160	1	135	0
18.	Wringinanom	161	0	246	0	214	0	189	1

Sumber: Laporan Pelaksanaan Jaminan Sosial Lanjut Usia PKH Plus, 2024.

Data tersebut mencerminkan adanya keberhasilan secara administratif juga komitmen dari pelaksana di tingkat kecamatan dalam memastikan bahwa bantuan sosial PKH Plus benar-benar sampai kepada lansia penerima manfaat.

Monitoring dan evaluasi (*monev*) merupakan bagian strategi penguatan PKH Plus di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Proses tersebut berfungsi menjadi alat kontrol terhadap efektivitas dan dampak program di lapangan. Melalui *monev* berbagai kendala dapat teridentifikasi lebih awal. Sehingga memungkinkan pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan secara tepat sasaran. Sebagaimana media sosial dan kanal informasi yang menjadi media pendukung dalam PKH Plus. Adanya publikasi kegiatan PKH Plus yang diunggah melalui media sosial digunakan untuk membentuk kontrol sosial dari masyarakat terhadap PKH Plus di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, dapat dimaknai bahwa legitimasi dan dukungan lingkungan terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) Plus di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik sebagai strategi penguatan program dibentuk melalui sinergi antar sektor pemerintah. Mulai dari penyaluran, pelaporan serta *monitoring* dan evaluasi (*monev*). Dukungan dari media kecamatan dan kanal informasi publik pemerintah daerah Kabupaten Gresik, turut memperluas ruang legitimasi melalui transparansi terhadap PKH Plus di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.

3. Kapasitas Operasional (*Operational Capacity*)

Salah satu aspek penting dalam penguatan kapasitas operasional menurut (Moore, 1995) terletak pada kemampuan lembaga dalam menempatkan sumber daya manusia. Pada PKH Plus di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik terdapat berbagai Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana. Mulai dari koordinator kabupaten, koordinator kecamatan hingga pendamping sosial PKH Plus. Kementerian Sosial RI melalui Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial tentang pengangkatan pendamping sosial PKH tahun 2024 menempatkan SDM pelaksana PKH Plus sesuai wilayah kebutuhan. Kemudian adanya agenda penunjang kinerja pelaksana diadakan rapat koordinasi yang berfungsi sebagai ruang pembelajaran bersama bagi para pendamping sosial PKH Plus untuk memahami dinamika kebijakan serta memperkuat kapasitas dalam hal pelaporan dan pelaksanaan teknis di lapangan. Selain rapat koordinasi pendamping sosial PKH Plus terdapat pula rapat rekonsiliasi. Untuk penguatan Program Keluarga Harapan (PKH Plus) terlaksana secara konsisten, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melakukan rapat rekonsiliasi bersama Dinas Sosial kabupaten/kota se-Jawa Timur. Selain ketersediaan sumber daya manusia pelaksana, Dinas Sosial Kabupaten Gresik juga menyediakan sarana pendukung guna menunjang kinerja para SDM PKH Plus. Dukungan ini antara lain berupa anggaran biaya operasional yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur. Sarana penunjang operasional SDM pelaksana PKH Plus di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik terus mengalami proses adaptasi, terutama dalam hal penggunaan teknologi informasi. Perubahan sistem administrasi dan pelaporan dari format manual berbasis Excel ke

sistem aplikasi menjadi tantangan sekaligus kemajuan penting dalam Program Keluarga Harapan (PKH Plus) di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.



Gambar 1. Tampilan Aplikasi SAPA BANSOS

Sumber: <https://sapabansos.dinsos.jatimprov.go.id/>, 2025.

Hasil temuan aspek kapasitas operasional pada strategic triangle penguatan Program Keluarga Harapan (PKH Plus) di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dimaknai sebagai kemampuan lembaga dalam memastikan pelaksanaan PKH Plus secara efektif melalui penempatan sumber daya manusia (SDM) pelaksana yang sesuai, penguatan koordinasi antar pelaksana melalui agenda rapat dan adanya ketersediaan sarana prasarana penunjang kinerja pelaksana PKH Plus.

Pembahasan

Setelah peneliti menguraikan hasil temuan di lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah serta fokus penelitian, maka tahap selanjutnya adalah mendeskripsikan, membahas serta menganalisis data secara teoritis. Peneliti menggunakan model *strategic triangle* yang dikemukakan oleh (Moore, 1995) sebagai kerangka analisis diantaranya adalah nilai publik (*public value*), legitimasi dan dukungan lingkungan (*the authorizing environment*) dan kapasitas operasional (*operational capacity*).

1. Nilai Publik (*Public Value*)

Nilai publik memiliki peran sentral dalam menilai keberhasilan suatu program publik. Menurut (Moore, 1995) nilai publik menjadi tolok ukur utama dalam strategi sektor publik karena mencerminkan dampak nyata dari kebijakan pemerintah terhadap masyarakat. Hal ini selaras dengan pendapat Alford & O'Flynn, 2009 dalam (Sahputri, 2023) yang menegaskan bahwa nilai publik merupakan elemen fundamental yang menjadi acuan dalam penciptaan manfaat sosial. Program Keluarga Harapan (PKH Plus) di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, nilai publik terlihat dari adanya perubahan yang dirasakan langsung oleh lansia penerima manfaat. Sebelum mendapatkan bantuan sosial PKH Plus lansia di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik hidup dalam kondisi ekonomi yang serba terbatas. Adapun dari penerima manfaat tersebut tidak memiliki penghasilan tetap dan sangat

bergantung pada bantuan keluarga untuk kebutuhan dasar seperti makan dan berobat. Kondisi tersebut menunjukkan belum terciptanya nilai publik sebelum PKH Plus hadir.

Berdasarkan hasil temuan, tampak bahwa nilai publik PKH Plus di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik termanifestasi dalam tiga bentuk perubahan pada lansia penerima manfaat setelah menerima bantuan sosial PKH Plus yaitu: peningkatan kesejahteraan secara ekonomi, kesehatan dan sosial. Perubahan dari segi ekonomi terlihat dari bantuan tunai sebesar Rp2.000.000 per tahun yang disalurkan secara bertahap. Mampu digunakan oleh para lansia untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti makanan, obat-obatan dan kebutuhan pribadi lainnya. Sebagaimana menurut penelitian oleh (Lathifah, 2022) lansia dengan keterbatasan fisik atau mobilitas yang terbatas menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, transportasi atau infrastruktur yang diperlukan untuk mempertahankan ekonomi mereka. Karena seiring bertambahnya usia kemampuan fisik dan kondisi kesehatan cenderung menurun yang pada akhirnya berdampak pada berkurangnya kapasitas untuk bekerja. Bantuan sosial PKH Plus di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik menjadi jembatan penting menuju kemandirian finansial, meskipun dalam skala kecil.

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) serta posyandu lansia menjadi strategi penguatan PKH Plus dalam nilai publik yang sesuai karena mampu menjadi ruang edukatif terkait kesehatan. Melalui P2K2 terdapat berbagai modul dimana lansia diberikan informasi dan pemahaman dasar tentang kesehatan, gizi dan akses layanan. Sebab definisi lansia menurut penelitian (Fitri et al., 2023) merupakan seseorang dianggap telah berusia 60 tahun atau lebih dengan kebutuhan dan masalah yang bervariasi dari rentang sehat sampai sakit. Sehingga membutuhkan perawatan yang lebih ekstra. Nilai publik juga terwujud dalam segi sosial lansia penerima manfaat PKH Plus di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Terdapat temuan bahwa terdapat 16 lansia tunggal yang tersebar di berbagai desa di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Sebagaimana Jensen, 1992 dalam (Sumai & Mutmainnah, 2022) menyatakan bahwa masalah sosial merupakan ketidaksesuaian antara harapan dan realitas atau kesenjangan antara kondisi yang terjadi dengan kondisi ideal yang seharusnya.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai publik pada strategic triangle penguatan PKH Plus di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dirasakan secara nyata baik dari segi ekonomi, kesehatan dan sosial. Nilai publik dilakukan dengan pelibatan langsung terhadap penerima manfaat. Penerima manfaat merasakan dampak yang positif bagi kehidupannya. Pelaksana PKH Plus menjalankan tugasnya dengan baik sehingga lansia merasakan manfaat terhadap program.

2. Legitimasi dan Dukungan Lingkungan (*The Authorizing Environment*)

(Moore, 1995) menyatakan bahwa legitimasi dan dukungan lingkungan merupakan aspek penting yang menopang validitas dan keberlangsungan sebuah program publik. Hal ini sejalan dengan penelitian (Zefanya et al., 2025) yang menyatakan bahwa tanpa dukungan politik dan kelembagaan yang kuat dari pemangku kepentingan program sebesar apa pun tidak akan dapat dijalankan secara konsisten. Program Keluarga Harapan (PKH Plus) di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa telah mendapatkan legitimasi dan dukungan lingkungan yang luas. Legitimasi dan dukungan lingkungan tersebut tercermin dari adanya keterlibatan para aktor pemerintah. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyaluran, pelaporan serta *monitoring* dan evaluasi (*monev*) PKH Plus.

Pada tahap penyaluran PKH Plus di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik keterlibatan pemerintah terlihat dalam hal fasilitasi kegiatan dan komunikasi antar instansi. Keterlibatan aktor pemerintah tersebut menjadi kunci guna bantuan sosial PKH Plus disalurkan secara cepat dan tepat sasaran. Menurut Suharto, 2014 dalam (Pradana, 2020) menyatakan bahwa kesejahteraan sosial membutuhkan keterlibatan lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam memberikan solusi atas permasalahan sosial. Berdasarkan pandangan tersebut maka PKH Plus di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik telah memenuhi hal tersebut.

Pada tahap pelaporan PKH Plus di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik keterlibatan pemerintah terlihat dalam hal koordinator kabupaten dan koordinator kecamatan PKH Plus menjadi aktor sentral dalam memastikan bahwa penyaluran bantuan berjalan sesuai pedoman. Pelaporan utama terkait PKH Plus berasal dari para pendamping sosial PKH Plus yang tersebar di 16 desa wilayah Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Bank Jatim selaku bank penyalur memastikan bahwa dana hanya disalurkan kepada penerima manfaat yang valid. Ketika ditemukan ketidaksesuaian data, dana dikembalikan ke rekening penampungan pemerintah.

Monitoring dan evaluasi (*monev*) merupakan bagian dari strategic triangle penguatan Program Keluarga Harapan (PKH Plus) di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Hal ini sejalan dengan penelitian (Subekti et al., 2024) yang menekankan bahwa koordinasi dan *monitoring* berkala merupakan elemen krusial dalam program sosial. *Monev* berperan sebagai instrumen kontrol dalam memastikan PKH Plus serta mengidentifikasi potensi kendala di lapangan secara dini.

Jika dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Jawa Timur, PKH Plus di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik menunjukkan keterlibatan aktor pemerintah yang lebih kuat. Seperti penelitian yang dilakukan (Brianita & Prathama, 2024) di Kabupaten Pamekasan masih ditemukan permasalahan seperti kendala dalam melaksanakan PKH Plus yaitu terdapat data lansia dalam DTKS yang tidak sesuai dan tidak optimalnya komunikasi antar lembaga. Namun di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik sinergi antara Dinas Sosial Kabupaten Gresik, pelaksana PKH Plus, Pemerintah Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dan Bank Jatim menciptakan sistem yang mampu menjawab kendala administratif dan sosial secara cepat.

Media sosial yang digunakan oleh pelaksana PKH Plus di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik berfungsi sebagai alat untuk membangun legitimasi publik. Informasi terkait jadwal penyaluran, kegiatan P2K2, posyandu lansia serta dokumentasi kunjungan lapangan secara rutin diunggah di akun media sosial. Langkah ini mencerminkan komunikasi publik yang transparan. Nabatchi & Sancino, 2014 dalam (Andriana, 2024) menyebutkan bahwa legitimasi publik dibentuk melalui interaksi dan komunikasi yang partisipatif.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan temuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa strategic triangle penguatan Program Keluarga Harapan (PKH Plus) di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik pada aspek legitimasi dan dukungan lingkungan (*the authorizing environment*) (Moore, 1995) telah berjalan dengan baik. PKH Plus di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik telah memperoleh legitimasi dari berbagai tingkatan pemerintahan. Tidak adanya tumpang tindih terhadap kebijakan maupun aturan. Tanpa adanya legitimasi dan dukungan dari pemangku kepentingan, data lansia berpotensi tidak akurat hingga munculnya masalah sosial seperti kecemburuan sosial. Sehingga dapat menyebabkan tujuan utama PKH Plus untuk kesejahteraan lansia tidak tercapai.

3. Kapasitas Operasional (*Operational Capacity*)

(Moore, 1995) menyebutkan bahwa kapasitas operasional mencakup kemampuan lembaga dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Kapasitas operasional merujuk pada sejauh mana lembaga mampu menggunakan dan mengelola sumber daya secara efektif untuk mendukung pencapaian tujuan program. Hal ini sejalan dengan penelitian (Giest, 2023) menegaskan bahwa keberhasilan pelayanan sosial sangat ditentukan oleh adaptasi operasional terhadap karakteristik wilayah, termasuk kemampuan lembaga dalam mendistribusikan peran dan tanggung jawab secara fleksibel sesuai dengan geografis setempat.

Kapasitas operasional PKH Plus di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik ditunjukkan melalui kemampuan instansi dalam hal ini adalah Kementerian Sosial RI melalui Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial tentang pengangkatan pendamping sosial PKH tahun 2024 mampu menempatkan SDM pelaksana PKH Plus secara tepat. Di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik terdapat sebanyak 128 lansia penerima manfaat didampingi oleh lima orang pelaksana PKH Plus, yang terdiri atas satu koordinator kecamatan dan empat pendamping sosial PKH Plus. Jumlah SDM ini dipandang cukup sesuai, karena pembagian wilayah tugas didasarkan disesuaikan dengan kemampuan individu pendamping sosial PKH Plus serta wilayah domisi pelaksana PKH Plus.

Pendamping sosial PKH Plus Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik juga membangun hubungan sosial yang baik dengan lansia dampingan. Hal ini sesuai dengan teori perlindungan sosial oleh Barrientos & Shepherd, 2003 dalam (Akbar,

2021) yang menekankan bahwa perlindungan sosial harus bersifat transformatif. Yang artinya tidak hanya memberikan bantuan untuk kebutuhan tetapi juga harus mampu membawa perubahan yang lebih baik bagi kehidupan penerima manfaat.

Kapasitas operasional juga diperkuat dengan dukungan sarana dan prasarana penunjang pelaksana PKH Plus di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dan pemanfaatan aplikasi SAPA BANSOS. Yang kegunaannya mempermudah pendamping sosial PKH Plus Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dalam pengelolaan data lansia dan mempercepat respons terhadap perubahan data di lapangan. Sebagaimana dijelaskan dalam (Hanifah & Frinaldi, 2025) bahwa modernisasi berbasis aplikasi dapat meningkatkan efisiensi pelayanan jika didukung oleh infrastruktur dan kompetensi pelaksana yang memadai.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kapasitas operasional dalam strategic triangle penguatan PKH Plus di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik telah berjalan dengan baik. Jika kapasitas operasional ini tidak terus diperkuat, maka berisiko menimbulkan hambatan seperti keterlambatan pencairan bantuan, tidak optimalnya pendampingan, serta turunnya kualitas pelayanan kepada lansia penerima manfaat di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa strategi penguatan Program Keluarga Harapan (PKH Plus) di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik telah berjalan efektif melalui model *Strategic Triangle* (Moore, 1995). Dari aspek nilai publik, PKH Plus berhasil menciptakan perubahan positif bagi lansia penerima manfaat, dengan meningkatkan kemandirian ekonomi, akses layanan kesehatan dan sosial. Aspek legitimasi dan dukungan lingkungan tercermin dari keterlibatan lintas aktor pemerintahan serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana transparansi dan kontrol sosial yang memperkuat keberlangsungan program. Sedangkan dari aspek kapasitas operasional, PKH Plus didukung oleh penempatan SDM yang tepat dan tersedianya sarana prasarana yang menunjang kinerja pelaksana. Sinergi antar ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa strategic triangle penguatan PKH Plus memberikan kontribusi nyata bagi lansia di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik secara berkelanjutan.

Saran

Penulis memberikan saran yang diharapkan dapat mendukung penguatan Program Keluarga Harapan (PKH Plus) di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik pada masa mendatang. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian terhadap ketersediaan fasilitas yang memadai dan setara bagi aparatur kecamatan. Langkah ini diyakini akan

memperkuat peran aparaturnya dalam mengawal PKH Plus sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, N. (2021). *Analisis Pemetaan Distribusi Bantuan Perlindungan Sosial dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Aceh*. UIN Ar-Raniry.
- Andriana, D. (2024). *Akuntabilitas Publik*. Deepublish Digital.
- Brianita, O., & Prathama, A. (2024). Implementasi Program Keluarga Harapan Perlindungan Lanjut Usia (PKH Plus) di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 7(2), 137–152. <https://doi.org/10.36341/jdp.v7i2.4479>
- Damanik, I. Y. (2024). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kualitas Hidup Lansia Di wilayah kerja Puskesmas Kenali Besar Kota Jambi Tahun 2023*. Universitas Jambi.
- Fitri, T., Malau, B., Silitonga, S., & Hutagalung, S. A. (2023). Penyuluhan terhadap lansia: Mengenal karakteristik para lansia. *ELETTRA: Jurnal Pendidikan Penyuluhan Agama Kristen Negeri Truntung*, 1(1), 47–56. <https://elettra.iakntarutung.ac.id>
- Giest, S. (2023). Policy capacity mechanisms for addressing complex, place-based sustainability challenges. *OECD-EC High-Level Workshop Series: Place-Based Policies for the Future*, 1–38.
- Hanifah, Z., & Frinaldi, A. (2025). Inovasi Budaya Organisasi Di Sektor Publik: Strategi Adaptasi Terhadap Disrupsi Digital. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 296–305. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5377>
- Izza, N. N., Afifuddin, & Suyeno. (2021). Strategi Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kota Batu (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu). *Jurnal Respon Publik*, 15(5), 16–22.
- Kusuma, A. R. (2023). *Analisis Strategi dalam Menjalankan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan (Studi Kasus di Kecamatan Jagakarsa*. Universitas Nasional.
- Lathifah, F. (2022). *Ketahanan Ekonomi Dalam Masa Lansia: Menjaga Kesejahteraan Generasi Tua*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. UI-Press.
- Moore, M. H. (1995). *Creating public value: Strategic management in government*. Harvard University Press.
- Pradana, R. A. (2020). Sosial, Politik, dan Ekonomi Kesejahteraan Sosial: Refleksi

Demokrasi dan Fenomena Sosial Indonesia. *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(2), 87–101.
<https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v3i2.3717>

Rino Subekti, Daniel Adolf Ohyver, Loso Judijanto, I Kadek Susila Satwika, Najirah Umar, Dr. Nur Hayati, I Putu Susila Handika, Joosten, Migunani, Yoseb Boari, & Dr. Saktisyahputra (2024). Transformasi Digital: Teori & Implementasi menuju era society 5.0. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Sahputri, R. A. M. (2023). *Public Value Management: Model Tata Kelola Pelayanan Publik*. Universitas Brawijaya Press.

Statistik, B. P. (2023). *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2023* (B. S. Yeni Rachmawati, Raden Sinang, Badan Pusat Statistik).

Sumai, S., & Mutmainnah, A. N. (2022). Masalah Sosial Anak di Kota Makassar: Studi Kasus Anak dari Keluarga Penyalahgunaan Narkoba. *Annual Conference Series*, 2018, 131–135.

Zefanya, B., Redjo, S. I., & Bintari, A. (2025). *Strategi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas di Kota Bekasi : Analisis Strategic Triangle*. 6(2), 149–164.